

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan pada prinsipnya tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan materi dalam kehidupan manusia, namun pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi perubahan mendasar atas institusi/lembaga yang ada, dan perubahan orientasi dari seluruh sistem baik sosial maupun ekonomi.

Ketersediaan sumber daya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan menjadi agenda utama bagi pemerintah dalam setiap tahun kegiatan pembangunannya. Pembangunan di masing-masing aspek kehidupan akan saling terkait satu sama lainnya, seperti halnya dengan pembangunan ekonomi, dimana utamanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Kebijakan dalam pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan pembangunan di bidang sosial, sehingga dasar perencanaan pembangunan merupakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin, serta berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pembangunan Bidang Ekonomi yang diharapkan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, maka perlu memperhatikan visi dan misi pembangunan Nusa Tenggara Barat periode 2013 – 2018 yaitu MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYASAING DAN SEJAHTERA.

Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 tidak terlepas dari visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTB 2005 – 2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2008. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka telah dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 yaitu sebagai berikut :

- 1) Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter melalui pemantapan ketaatan beragama, peningkatan budipekerti, dan pengembangan toleransi.
- 2) Mengembangkan budaya dan kearifan lokal;
- 3) Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan;
- 4) Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah;
- 6) Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang;
- 7) Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan visi dan misi dalam Bidang Ekonomi yakni :

- a) Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi terutama pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan SDM yang produktif, mandiri, maju dan berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- b) Perwujudan ekonomi dalam rangka Pembangunan Daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian yang utama pada tercakupnya kebutuhan dasar yaitu Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, Pendidikan dan Lapangan Kerja.

Memperhatikan hal-hal tersebut maka untuk mengarahkan pembangunan bidang perekonomian diperlukan suatu pedoman/acuan yang harus dipedomani oleh setiap stakeholder bidang perekonomian agar dapat tercapai tujuan dan sasaran seperti yang telah dihatatkan dalam visi misi.

Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2013–2018 pada Biro Administrasi Perekonomian” Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018 adalah untuk menjabarkan visi dan

misi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 kedalam rencana program/kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Penyusunan Renstra Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar penyusunan kebijakan, program kegiatan dan tolok ukur kinerja Biro Administrasi Perekonomian setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pencapaian visi-misi serta tujuan organisasi. Disamping itu juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Biro.

b. Tujuan

1. Menyediakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan mensinkronkan arah rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi-misi Renstra Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB yang berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB.
2. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB.
4. Menjadi pedoman pada Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi.
5. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 terdiri dari tujuh bab adalah sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
- 2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola.
- 2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan.
- 3.2. Hasil – hasil yang telah dicapai 5 (lima) tahun sebelumnya.
- 3.3. Analisis Isu-isu strategis.
- 3.4. Analisis Lingkungan Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi.
- 4.2. Tujuan dan Sasaran.
- 4.3. Strategi dan kebijakan.

BAB V. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan.
- 5.2. Pendanaan Indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTB.

BAB VII. PENUTUP

Lampiran

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

a. Tugas Pokok

Adapun Uraian tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian adalah sebagai berikut :

Biro Administrasi Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan, dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan dan penyiapan pembinaan penyelenggaraan Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan, dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.
- b) Perumusan dan penyusunan rencana/program di bidang Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan, dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.

- c) Perumusan kebijakan penyelenggaraan di bidang Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan, dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.
- d) Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan, dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.
- e) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian sebagai berikut :

(1) Bagian Produksi Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi, penyusunan dan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang produksi olahan, produksi budidaya, dan bahan galian dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Produksi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi olahan, produksi budidaya, dan bahan galian dan energi;
- Penyusunan rencana/program kerja di bidang produksi olahan, produksi budidaya, dan bahan galian dan energi;
- Penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di bidang produksi olahan, produksi budidaya, dan bahan galian dan energi;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang produksi olahan, produksi budidaya, dan bahan galian dan energi;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

a. Sub Bagian Produksi Olahan

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang produksi olahan;
2. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang produksi olahan;
3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang produksi olahan;
4. menyiapkan rencana/program kerja di bidang produksi olahan;
5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi olahan;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Sub Bagian Produksi Budidaya

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang produksi budidaya;
2. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis di bidang produksi budidaya;
3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang produksi budidaya;
4. menyusun rencana/program kerja di bidang produksi budidaya;
5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi budidaya;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

c. Sub Bagian Bahan Galian dan Energi

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang bahan galian dan energi;
2. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis di bidang bahan galian dan energi;
3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang bahan galian dan energi;
4. menyusun rencana/program kerja di bidang bahan galian dan energi;
5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang bahan galian dan energi;

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

(2) Bagian Sarana Perekonomian Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang Usaha Perekonomian Daerah, Kelembagaan Perekonomian Daerah, dan Perusahaan Daerah & BUMD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Sarana Perekonomian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang Usaha Perekonomian Daerah, Kelembagaan Perekonomian Daerah, dan Perusahaan Daerah & BUMD;
- Penyusunan rencana/program kerja di bidang Usaha Perekonomian Daerah, Kelembagaan Perekonomian Daerah, dan Perusahaan Daerah & BUMD;
- Penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di bidang Usaha Perekonomian Daerah, Kelembagaan Perekonomian Daerah, dan Perusahaan Daerah & BUMD;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Usaha Perekonomian Daerah, Kelembagaan Perekonomian Daerah, dan Perusahaan Daerah & BUMD;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

a. Sub Bagian Usaha Perekonomian Daerah

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang usaha perekonomian daerah;
2. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis di bidang usaha perekonomian daerah;
3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang usaha perekonomian daerah;
4. menyiapkan rencana/program kerja di bidang usaha perekonomian daerah;
5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha perekonomian daerah;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Sub Bagian Kelembagaan Perekonomian Daerah

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan perekonomian daerah;
2. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis di bidang kelembagaan perekonomian daerah;
3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kelembagaan perekonomian daerah;
4. menyusun rencana/program kerja di bidang kelembagaan perekonomian daerah;
5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan perekonomian daerah;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

c. Sub Bagian Perusahaan Daerah dan BUMD

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perusahaan daerah dan BUMD;
2. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis di bidang perusahaan daerah dan BUMD;
3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang perusahaan daerah dan BUMD;
4. menyusun rencana/program kerja di bidang perusahaan daerah dan BUMD;
5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perusahaan daerah dan BUMD;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

(3) Bagian Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaporan penyusunan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pengembangan Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan;
- Penyusunan rencana/program kerja di bidang Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Lembaga Keuangan;
- Penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di bidang Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Lembaga Keuangan;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Investasi, dan Pengembangan Lembaga Keuangan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

a. Sub Bagian Pengembangan Investasi

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang investasi;
2. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis di bidang investasi;
3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang investasi;
4. menyiapkan rencana/program kerja di bidang investasi;
5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang investasi;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Sub Bagian Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan lembaga keuangan non bank;
2. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis di bidang pengembangan lembaga keuangan non bank;
3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan lembaga keuangan non bank;
4. menyusun rencana/program kerja di bidang pengembangan lembaga keuangan non bank;
5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga keuangan non bank;

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

c. Sub Bagian Pengembangan Lembaga Keuangan Bank

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Bank;
2. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis di bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Bank;
3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Bank;
4. menyusun rencana/program kerja di bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Bank;
5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Bank ;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

(4) Bagian Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang Pendataan dan Statistik, Monitoring dan Evaluasi, dan Tata Usaha Biro dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang pendataan dan statistik, monitoring dan evaluasi, dan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga biro dan pelaporan;
- Penyusunan rencana/program kerja di bidang pendataan dan statistik, monitoring dan evaluasi, dan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga biro dan pelaporan;
- Penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di bidang pendataan dan statistik, monitoring dan evaluasi, dan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga biro dan pelaporan;

- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan statistik, monitoring dan evaluasi, dan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga biro dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - a. Sub Bagian Pendataan dan Statistik

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

 1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan statistik;
 2. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan statistik;
 3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendataan dan statistik;
 4. menyusun rencana/program kerja di bidang pendataan dan statistik;
 5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan statistik;
 6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

 1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi perekonomian daerah;
 2. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi perekonomian daerah;
 3. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendataan dan statistik perekonomian daerah;
 4. menyusun rencana/program kerja di bidang pendataan statistik perekonomian daerah;
 5. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan statistik perekonomian daerah;
 6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan

Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja;
2. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
3. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
4. melaksanakan urusan keuangan;
5. melaksanakan urusan kepegawaian;
6. Menyelenggarakan urusan perlengkapan;
7. menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan biro;
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

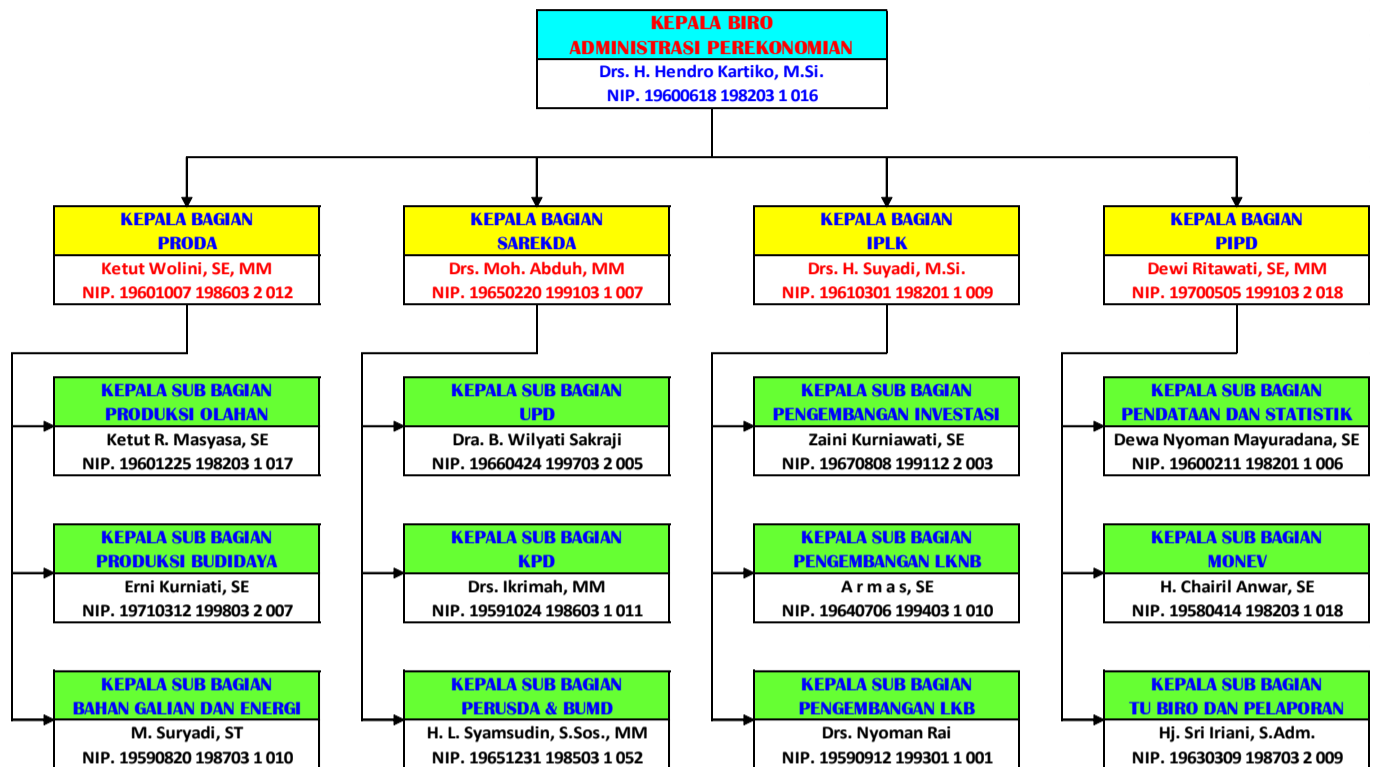
Struktur Organisasi

Struktur organisasi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB berdasarkan Perda No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2012, sebagai berikut :

- a. Bagian Produksi Daerah;
 - 1) Sub Bagian Produksi Olahan
 - 2) Sub Bagian Produksi Budidaya
 - 3) Sub Bagian Bahan Galian dan Energi
- b. Bagian Sarana Perekonomian Daerah;
 - 1) Sub Bagian Usaha Perekonomian Daerah
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan Perekonomian Daerah
 - 3) Sub Bagian Perusda dan BUMD
- c. Bagian Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan;
 - 1) Sub Bagian Pengembangan Investasi
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Lembaga Keuangan Bank
- d. Bagian Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.
 - 1) Sub Bagian Pendataan dan Statistik
 - 2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro dan pelaporan

Dalam bentuk skema dapat digambarkan, sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA PROV. NTB**



2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pendidikan dan status kepegawaian berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang PNS dan 2 (dua) orang PTT. Rincian Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

No.	Uraian	Status		Jenis Kelamin		Jumlah
		PNS	Non PNS	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3		5	6	7
I.	Pegawai	41	2			
2.	Jenis Kelamin	-	-	21	22	
3.	Golongan					
3.	Pendidikan					
	- Pasca Sarjana	6	-			
	- Sarjana	21	1			
	- Sarjana	1	-			
	- D3	11	1			
	- SMA	-	-			
	- SMP	1	-			
	- SD					
4.	Golongan					

a) Tingkat Pendidikan :

- 1) Strata Dua (S2) = sebanyak 6 orang;
- 2) Strata Satu (S1) = sebanyak 21 orang;
- 3) Sarjana Muda (Diploma) = sebanyak 2 orang;
- 4) SLTA = sebanyak 11 orang;
- 5) SLTP = -
- 6) SD = sebanyak 1 orang.

b) Tenaga Pegawai Tidak Tetap :

- 1) Strata Satu (S1) = sebanyak 1 orang;
- 2) SLTA = sebanyak 1 orang;

c) Berdasarkan Eselon :

- 1) Eselon II = sebanyak 1 orang;
- 2) Eselon III = sebanyak 4 orang;
- 3) Eselon IV = sebanyak 12 orang.

2.2.2. Aset yang dikelola

Aset yang dikelola pada Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah beberapa sarana dan prasarana masih dirasakan kurang

mencukupi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kegiatan Biro antara lain perlu penambahan komputer, meubelair, faximile dan pemasangan internet guna mendukung akses informasi perekonomian daerah

Adapun rincian asset yang dikelola pada saat ini dapat dilihat pada tabel 2.1.

Daftar Barang Inventaris Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4 (empat)	5 unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	12 unit	Baik
3	Mesin ketik	4 unit	2 Rusak berat
4	Filling Besi/Kabinet	13 unit	7 Rusak berat
5	Brand Kas	3 unit	2 Rusak ringan
6	Display/Infocus	1 unit	Rusak ringan
7	Lemari Kayu	5 unit	1 Rusak berat
8	Rak Kayu	7 unit	Baik
9	AC Split	12 unit	Baik
10	Camera Video	2 unit	Baik
11	PC. Unit/CPU	6 unit	Baik
12	Laptop/Note Book	7 unit	Baik
13	Personal Komputer Lain-lain	2 unit	Rusak ringan
14	Hard Disk	9 unit	Rusak berat
15	Peralatan Mini Komputer	14 unit	Rusak berat
16	Monitor	16 unit	2 Rusak Berat
17	Printer	15 unit	5 Rusak berat
18	UPS	9 unit	4 Rusak berat
19	Hidrانت Kebakaran	2 unit	1 Rusak berat
20	Mesin PCB	1 unit	Rusak berat

2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

2.3.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan tupoksi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB maka jenis pelayanan yang dilaksanakan hampir seluruhnya bersifat koordinasi terutama dengan SKPD yang ada kaitannya dengan bidang perekonomian serta pelayanan penyiapan bahan/telaahan staf bagi pimpinan daerah baik Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretaris Daerah maupun Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun jenis pelayanannya sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan pada bidang Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi dan

Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.

- b. Menyiapkan bahan rumusan dan penyusunan rencana/program pemerintah pada bidang Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.
- c. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada bidang Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada bidang Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.
- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pemerintahan pada bidang Produksi Daerah, Sarana Perekonomian Daerah, Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah.

Disamping itu ada pula tugas khusus yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian yakni Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi NTB, serta koordinasi Program Raskin.

2.3.2. Kelompok Sasaran

Sama halnya dengan jenis pelayanan SKPD yakni pelayanan yang bersifat koordinatif, maka yang menjadi kelompok sasaran pelayanan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB adalah Dinas-dinas teknis yang terkait dengan bidang perekonomian yaitu (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Dinas Nakertrans, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Sosial Dukupil, Perum Bulog, Dinas Kehutanan, Badan Penanaman Modal, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Budpar, Bappeda, Dinas Pertambangan dan Energi, Biro AP dan LPBJ, Biro Kerjasama, dan Bank Indonesia).

Untuk pembinaan BPR, Biro Administrasi Perekonimian membina 8 (delapan) PD. BPR - NTB yang tersebar diseluruh Kabupaten / Kota se – NTB. Nama dan lokasi PD. BPR - NTB dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait Dengan Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB

3.1.1. Evaluasi Masa Lalu

Dalam kegiatan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku fungsi koordinasi bagi seluruh bagian perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh bagian dengan sasaran dan capaian indikator kinerja utama yang tertuang didalam RPJMD 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat biasa dibedakan menjadi dua kelompok yaitu dengan sub sektor pertambangan non migas dan tanpa sub sektor pertambangan non migas, namun demikian untuk melihat perekonomian Nusa Tenggara Barat secara riil maka harus mengabaikan kontribusi dari sektor pertambangan non migas. Laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat tanpa sub sektor pertambangan non migas pada tahun 2009 mencapai 7,52% yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode RPJMD serta berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan yang hanya tumbuh sebesar 4,22%, kemudian pada tahun 2011 dan 2012 kembali mengalami peningkatan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,57% dan 5,72%, serta pada tahun 2013 ditengah terjadi pergolakan harga akibat kenaikan harga BBM ekonomi Nusa Tenggara Barat mampu tumbuh sebesar 5,61%.

b) Laju Inflasi

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir secara umum dapat terkendali sesuai dengan sasaran RPJMD 2008 – 2013 terkecuali pada tahun 2010 dan 2013 inflasi di atas sasaran RPJMD yang diakibatkan dari sisi *administered*

dimana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak yang langsung mengerek terjadinya inflasi yang cukup tinggi.

Tahun 2009 inflasi Nusa Tenggara Barat mencapai 3,34% yang merupakan inflasi terendah selama periode RPJMD 2008-2013, kemudian mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2010 dengan laju inflasi mencapai dua digit yaitu sebesar 10,08% sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Pada tahun 2011 dan 2012 inflasi Nusa Tenggara Barat masih cukup terkendali dengan laju inflasi mencapai 6,55% dan 3,99%, namun pada tahun 2013 laju inflasi kembali mengalami peningkatan mencapai 9,51% sebagai akibat kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak.

Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat biasanya disebabkan dari sisi *volatile food* yaitu meningkatnya harga beberapa komoditi strategis seperti cabe, bawang merah, tomat, daging sapi, daging ayam, telur, dll. Kenaikan harga komoditi tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada saat hari-hari besar keagamaan yang jatuhnya hampir bersamaan seperti Maulid Nabi dengan Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Kuningan, serta rantai distribusi yang sangat berpengaruh pada keadaan cuaca.

c) Forum Pengembangan Ekonomi Lokal

Guna memenuhi target pencapaian terbentuknya 10 (sepuluh) Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat maka Biro Administrasi Perencanaan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan Koordinasi dengan 10 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat guna memfasilitasi terbentuknya Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di seluruh Kabupaten/Kota bagi yang belum memiliki serta penguatan organisasi bagi yang telah memiliki Forum PEL di Kabupaten/Kota.

Sampai dengan tahun 2013 di Nusa Tenggara Barat telah terbentuk 10 Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Hal ini tentu sesuai dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008 - 2013. Terbentuknya Forum Pengembangan ekonomi lokal ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap Kabupaten/Kota yang memiliki hasil produksi komoditi baik dari pertanian, perkebunan, hasil laut, gerabah dan lain-lain.

d) Pendapatan Asli Daerah dari PD. BPR NTB

Perusahaan Daerah (PD) yang menjadi binaan Biro Administrasi Perekonomian setda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah PD. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PD. BPR-NTB). Perusahaan daerah ini merupakan perusahaan yang di marger antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. PD. BPR-NTB Kabupaten/Kota ini merupakan konsolidasi dari BPR-LKP yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang konsolidasi PD. BPR-NTB, maka dari 46 unit PD. BPR-LKP di Nusa Tenggara Barat dilakukan konsolidasi BPR-LKP di masing-masing Kabupaten/Kota dengan PD. BPR NTB. Adapun Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan konsolidasi/penggabungan sampai dengan saat ini adalah :

1. Kota Mataram dengan nama PD. BPR NTB Mataram
2. Kabupaten Lombok Barat dengan nama PD. BPR NTB Lombok Barat
3. Kabupaten Lombok Tengah dengan nama PD. BPR NTB Lombok Tengah.
4. Kabupaten Lombok Timur dengan nama PD. BPR NTB Lombok Timur.
5. Kabupaten Sumbawa Barat dengan nama PD. BPR NTB Sumbawa Barat.
6. Kabupaten Sumbawa dengan nama PD. BPR NTB Sumbawa
7. Kabupaten Dompu dengan nama PD. BPR NTB Dompu.
8. Kabupaten Bima dengan nama PD. BPR NTB Bima.

Dengan konsolidasi tersebut maka BPR-LKP yang ada di masing-masing kecamatan bergabung dalam satu lembaga dengan nama PD. BPR NTB Kabupaten/Kota dan sebagai kantor pusat adalah BPR yang berada di Ibu Kota Kabupaten, sedangkan BPR di Kecamatan sebagai kantor cabangnya.

Dari operasional PD. BPR tersebut diperoleh laba (deviden) yang dibagi secara proporsional sesuai jumlah dan besarnya saham dari masing-masing Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laba yang diperoleh sebagai bagian Pemerintah Provinsi disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah. Jumlah deviden PD. BPR NTB yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat dan di setor ke Kas Daerah. Pada tahun 2009 jumlah deviden yang yang diterima Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari PD. BPR NTB mencapai 4,4 Miliar, namun pada tahun 2010 dan 2011 jumlah yang diterima mengalami penurunan yaitu 2,08 dan 3,06 Miliar akibat baru dimulainya konsolidasi PD. BPR NTB yang berimbas pada menurunnya jumlah laba yang diperoleh. Pada tahun 2012 jumlah deviden yang diterima Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari PD. BPR NTB mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 5,46 Miliar, kemudian pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah deviden mencapai Rp. 6,98 Miliar. Sehingga secara rata-rata jumlah deviden yang diterima dari PD. BPR NTB melampaui dari sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 3,5 Miliar.

3.1.2. Gambaran Masa Kini dan Prediksi Masa Depan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2013	PREDIKSI				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pembinaan, Koordinasi dan Evaluasi Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,61%	5,60 - 5,75	5,75 - 5,85	5,85 - 6,00	6,00 - 6,25	6,25 - 6,50
2.	Pembinaan dan Evaluasi Laju Inflasi	9,51%	6 - 7	5,5 - 6	5	5	5
3.	Peningkatan PAD dari Perusda dan BUMD	55 M	68 M	73 M	78 M	89 M	95 M
4.	Tingkat kesehatan Perusda dan BUMD	7 Unit	8	9	10	12	12

3.2. Hasil- Hasil Yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pembinaan Koordinasi dan Evaluasi Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,52%	4,22%	5,57%	5,72%	5,61%
2.	Pembinaan dan Evaluasi Laju Inflasi	3,34%	10,08%	6,55%	3,99%	9,51%
3.	Pembinaan Koordinasi dan Evaluasi Forum Pengembangan Ekonomi Lokal	5	6	7	8	10

4.	Peningkatan PAD dari PD. BPR-NTB	4,40 M	2,08 M	3,06 M	5.46 M	6,98 M
----	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

3.3. Identifikasi Permasalahan

Berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan tugas, pokok dan fungsi dari Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

- a) Ketimpangan struktur ekonomi antara sektor pertanian dengan sektor jasa (sektor industri olahan belum berkembang).

Seiring dengan berkembangnya sektor jasa, sektor produksi (pertanian, peternakan, pangan, dan lain-lain) mendapat tantangan yang serius, terutama dari para pesaing luar daerah, bahkan luar negeri di era Global. Sektor industri olahan perlu ditopang dengan pengembangan keterampilan, bantuan modal dan pemasaran sehingga dapat bersaing dengan daerah lain dan mempunyai nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat.

- b) Pengembangan produk olahan masih kurang.

Saat ini, terjadi pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat dari pangan lokal (ubi kayu dan jagung) ke beras. Masuknya produk pangan olahan dari luar mempengaruhi pola konsumsi serta produksi pangan lokal. Pengembangan produk olahan di Nusa Tenggara Barat memerlukan dukungan pengembangan teknologi proses dan pengolahan serta strategi pemasaran yang baik untuk mengubah image pangan inferior menjadi pangan normal bahkan superior.

- c) Mekanisme penyaluran modal yang belum tepat.

Pelaku UMKM di Provinsi NTB masih dihadapkan pada kendala seperti minimnya dukungan pembiayaan karena aksesnya yang terbatas kepada lembaga perbankan. Keterbatasan akses ini dipicu oleh terbatasnya akses informasi permodalan, SDM, birokrasi dan manajemen UKM. Keterbatasan modal kurang mendorong petani dan nelayan untuk menerapkan teknologi baru dalam meningkatkan produktivitas, membatasi peningkatan nilai tambah, dan mengakibatkan ketergantungan pada penyediaan modal informal (pengijon).

- d) Sarana dan prasarana perusda dan BUMD yang belum memadai, manajemen pengelolaan perusda dan BUMD yang masih rendah dan modal dasar yang belum memadai.

Hal ini mengakibatkan kurang mampunya perusda dalam memberikan kredit kepada masyarakat dan kurang mampunya BUMD mengembangkan usahanya.

- e) Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar kawasan di NTB.

f) Masih lemahnya koordinasi dalam menjaga ketersediaan stok kebutuhan masyarakat.

Karakter Inflasi di Provinsi NTB juga sangat rawan adanya shock permintaan dan penawaran. Terbukti, inflasi mengalami kenaikan pada saat Maulid Nabi, Bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Galungan dan kemerdekaan RI maupun tekanan inflasi menjelang pergantian tahun yang meningkatkan konsumsi. Adanya tekanan inflasi dari sisi permintaan ini menunjukkan belum cukup siapnya pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga ketersediaan pasokan dalam menghadapi lonjakan permintaan yang terjadi

3.4. Analisis Isu-Isu Strategis Sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB

Dalam melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Bagian Sarana Perekonomian Daerah

- a. Tingkat kesehatan perusda dan BUMD belum memenuhi standar sehingga belum optimal memberikan deviden pada daerah.
- b. Dalam penanganan permasalahan yang dihadapi oleh perusda dan BUMD belum terintegrasi dengan baik.

2. Bagian Produksi Daerah

- a. Produk budidaya dan olahan kurang memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB.
- b. Kegiatan lingkup instansi baik provinsi, kabupaten/kota dalam hal peningkatan produksi belum terintegrasi dan bersinergi dengan baik.

3. Bagian Investasi Pengembangan Lembaga Keuangan

- a. Banyaknya lahan terlantar sehingga investor sulit untuk mendapatkan lahan untuk investasi .
- b. Pemberian kredit perbankan masih rendah kepada UMKM, Koperasi dan lembaga keuangan mikro.

4. Bagian Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah

- a. Perubahan iklim dan pergeseran musim yang mempengaruhi produktifitas sejumlah komoditi sehingga dapat memicu terjadinya inflasi.
- b. Data perekonomian yang tidak akurat mengakibatkan lemahnya pengambilan kebijakan tentang perekonomian daerah.

3.5. Analisis Lingkungan Strategis

No	Internal	No	External
I	Kekuatan 1. Struktur organisasi yang sangat memadai. 2. Tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani. 3. Kapasitas SDM yang baik.	I	Peluang 1. Tingginya kepercayaan Gubernur terhadap keberadaan perkembangan teknologi informasi. 2. Adanya beberapa peluang usaha perekonomian. 3. Globalisasi yang akan membuka peluang kerjasama pembangunan. 4. Masyarakat Ekonomi ASEAN.
II	Kelemahan 1. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat. 2. Belum optimalnya koordinasi dan konsultasi bidang perekonomian. 3. Terbatasnya sarana dana operasional pada Biro Administrasi Perekonomian.	II	Tantangan 1. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mengakibatkan masuknya produk luar secara bebas. 2. Kurang keberpihakan perbankan terhadap UMKM dan usaha bidang lainnya. 3. Berkembangnya perusahaan multinasional yang merambah pasar domestik.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang diamanatkan tersebut di atas maka perlu penetapan visi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Visi tersebut akan memberikan fokus kepada pencapaian sesuatu dan bukan merupakan jawaban atas suatu masalah, akan tetapi lebih pada sarana pemecahan masalah yang dihadapi organisasi sehingga secara menyeluruh visi yang akan ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan.

Visi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
“Mewujudkan Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal”.

Dari pernyataan visi tersebut di atas terkandung makna sebagai berikut :

1. Koordinasi pengelolaan administrasi guna menciptakan keharmonisan antara instansi terkait, swasta dan masyarakat guna meningkatkan perekonomian Nusa Tenggara Barat.
2. Pertumbuhan ekonomi dengan menyiapkan kebijakan dan perumusan bidang Sarana Perekonomian, Informasi, Investasi dan Produksi Daerah.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengendalikan laju inflasi daerah.

4.1.2. Misi

Untuk mencapai visi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi untuk menunjang peningkatan produksi daerah.
2. Mendorong tingkat kesehatan Perusda dan BUMD guna menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan PAD.

3. Mendorong peningkatan investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan keserasian data potensi perekonomian daerah sebagai bahan rumusan kebijakan.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang bersifat idealistik mengandung nilai-nilai dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil, yang akan menjadi arahan perjalanan organisasi dalam beberapa tahun yang akan datang dengan berdasarkan berbagai kriteria, aksesibilitas, fleksibilitas, motivasi, dan mudah difahami.

Sebagaimana visi misi yang telah ditetapkan, maka untuk keberhasilan pencapaiannya perlu ditetapkan tujuan Biro Administrasi Perekonomian yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi produksi budidaya Sapi, Jagung dan Rumput Laut.
2. Meningkatkan koordinasi produksi olahan.
3. Menjaga koordinasi ketersediaan BBM/Energi.
4. Meningkatkan koordinasi usaha perekonomian daerah.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusda dan BUMD.
6. Meningkatkan koordinasi kelembagaan perekonomian daerah.
7. Meningkatkan koordinasi peranan lembaga keuangan.
8. Meningkatkan koordinasi pengembangan investasi.
9. Meningkatkan koordinasi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
10. Meningkatkan koordinasi ketersediaan data dan informasi perekonomian.

4.2.2. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Keberhasilan mencapai berbagai sasaran organisasi lebih menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang

sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan unit kerjanya.

Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja organisasi sebagai alat untuk memacu agar semua bagian organisasi sadar dan kemungkinan timbulnya permasalahan karena adanya bidang-bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan hasil pada tingkat yang diharapkan.

Agar sasaran ini efektif, maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil yang dicapai dalam waktu satu tahun atau berlaku pada masa mendatang.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Biro Administrasi Perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya koordinasi peningkatan produksi budidaya PIJAR.
2. Terwujudnya koordinasi peningkatan produksi olahan.
3. Terwujudnya koordinasi ketersediaan BBM/Energi.
4. Terwujudnya koordinasi peningkatan usaha perekonomian daerah.
5. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas Perusda dan BUMD.
6. Terwujudnya koordinasi peningkatan kelembagaan perekonomian daerah.
7. Terwujudnya koordinasi peningkatan peranan lembaga keuangan.
8. Terwujudnya koordinasi peningkatan pengembangan investasi.
9. Terwujudnya koordinasi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
10. Terwujudnya koordinasi peningkatan ketersediaan data dan informasi perekonomian.

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran di atas, selanjutnya perlu dirumuskan strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi-misi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain ; struktur organisasi yang sangat memadai, cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dan kapasitas SDM yang memadai.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai kelemahan internal yang harus ditekan serendah mungkin antara lain, rendahnya ketersediaan data perekonomian yang akurat, masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi.

Disisi lain, hasil analisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang antara lain, tingginya kepercayaan Gubernur terhadap perkembangan teknologi informasi, globalisasi yang akan membuka peluang kerjasama pembangunan. Berbagai ancaman eksternal yang perlu diantisipasi antara lain berkembangnya perusahaan multinasional yang merambah pasar domestik, diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memperbolehkan keluar masuknya barang dari luar secara bebas.

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, treats*) dari hasil tersebut kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta penelitian/pengkajian strategis pembangunan lima tahun ke depan (2013-2018) adalah koordinasi, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi perekonomian daerah.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan dimaksudkan untuk mengarahkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun kebijakan umum Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mendorong dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, SKPD terkait, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan perekonomian daerah.
2. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan.

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan dan pengembangan produksi daerah.
 - a) Koordinasi, monitoring dan evaluasi produksi olahan.
 - b) Koordinasi, monitoring dan evaluasi produksi budidaya.
 - c) Koordinasi, monitoring dan evaluasi bahan galian dan energi.
2. Program unggulan dan strategis lain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).
 - a) Sosialisasi cukai rokok ilegal dan rokok ilegal.
 - b) Pemantauan dan pengawasan cukai rokok dan rokok ilegal.
 - c) Koordinasi cukai rokok dan rokok ilegal.
3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan.
 - Penataan kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Pembinaan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
 - b) Monitoring dan Evaluasi kinerja Perusda dan BUMD.
 - c) Pembinaan kegiatan usaha perekonomian daerah.
 - d) Pembinaan kelembagaan perekonomian daerah.
 - e) Peningkatan manajemen aset/barang daerah.
5. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
 - a) Koordinasi/fasilitasi pengembangan investasi.
 - b) Koordinasi/fasilitasi iklim investasi.
 - c) Koordinasi/fasilitasi perizinan investasi.
6. Program pengembangan lembaga keuangan.

- a) Koordinasi/fasilitasi kredit perbankan.
 - b) Koordinasi/fasilitasi lembaga keuangan non bank.
7. Program pengembangan data dan informasi perekonomian.
- a) Pendataan statistik perekonomian.
 - b) Koordinasi/konsultasi pengendalian inflasi daerah.
 - c) Monitoring dan evaluasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
 - d) Koordinasi/konsultasi pengembangan ekonomi daerah.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- a) Penyediaan jasa surat-menyurat.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - d) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - g) Penyediaan makanan dan minuman.
 - h) Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.
 - i) Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran.
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
 - c) Pengadaan meubeler.
 - d) Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik.
 - e) Pengadaan kendaraan dinas kantor.
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
 - b) Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP.
11. Program peningkatan sumber daya manusia.
- ✓ Mengikuti diklat/ seminar/ simposium/ lokakarya.

5.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat khusus untuk Belanja Langsung (rincian terlampir pada lampiran 3) sebagai berikut :

1. Tahun 2014 sebesar Rp. 3.695.755.700
2. Tahun 2015 sebesar Rp. 4.415.871.500
3. Tahun 2016 sebesar Rp. 5.157.567.500
4. Tahun 2017 sebesar Rp. 6.084.285.500
5. Tahun 2018 sebesar Rp. 7.103.315.500

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional (2014-2018) meliputi indikator kinerja berdasarkan program kegiatan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Indikator kinerja sebagai dasar evaluasi pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Perekonomian mengacu pada upaya untuk meningkatkan fungsi fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dibidang ekonomi dimana hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian sebagai fasilitator dan koordinator pelaksana program pembangunan daerah dalam meningkatkan perekonomian Provinsi NTB.

Adapun indikator kinerja Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTB pada lampiran 4.

BAB VII

PENUTUP

Dengan dirumuskannya visi dan misi yang kuat maka suatu instansi pemerintah akan menjadi dirigen yang dapat mengatur irama kegiatannya, menjadi manajer dalam pengelolaan sumber dayanya dan dalam pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai evaluasi pengukuran kinerja, yang akan diakumulasikan dan diintegrasikan sehingga menghasilkan sinergis.

Perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang. Pelayanan Prima merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang merupakan hal utama untuk diperhatikan. Oleh karena itu pola pelayanan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan strategis berkembang menjadi sarana operasi organisasi sehingga keberhasilan dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kinerja seluruh aparatur pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta sarana dan prasarana yang mendukung pada Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keberhasilan pelaksanaan dan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat tergambar di atas namun lebih lanjut tergantung pada partisipasi aktif serta keterkaitan dan keterpaduan peran masing-masing instansi terkait untuk menjadi saling menguatkan dan sinergis.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian
Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat,



(Drs. H. Hendro Kartiko, M.Si)